

BAB II

GERAKAN FEMINISME DAN GENRE PEREMPUAN DI MEDIA INDONESIA

Bab II tulisan ini akan menguraikan tentang perempuan Indonesia dan penggambarannya dalam sinetron, terutama sinetron religi. Mengingat tingginya pluralitas agama, suku bangsa, dan kelas sosial, bagian ini hanya menguraikan tentang perempuan Indonesia kelas menengah ke atas sebagaimana ditampilkan dalam karakter Hajah Rumi di sinetron *Tukang Bubur Naik Haji, the Series*. Kriteria historical situatedness dipertimbangkan dalam bab ini untuk mencermati bagaimana konstruksi sosial keperempuanan di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan budaya, politik dan ekonomi dalam sejarah panjang yang semakin dimapankan dengan penggambaran yang ditampilkan dalam media, terutama sinetron yang disebut sebagai genre perempuan.

2.1. Perempuan Indonesia

Ketimpangan dalam relasi gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat terhadap laki-laki telah berlangsung dalam waktu yang panjang. Dalam studinya mengenai pergerakan dan pencapaian perempuan Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 1960, Cora de-Stuers menguraikan tentang posisi dan perjuangan perempuan dalam melawan adat dan kolonial. Adalah perempuan, bukan laki-laki yang merupakan poros dan elemen permanen, penting, dan stabil dalam kehidupan masyarakat sosial masyarakat Indonesia yang komunal (Stuers, 2008: 9). Walaupun secara umum sejarah menuliskan perempuan pada posisi subordinat terhadap laki-laki, Stuers (2008: 47-51) dan Blackburn (2004: 8-9)

mencatat temuan beberapa penulis terdahulu tentang adanya masa dimana perempuan memiliki martabat yang tinggi dalam masyarakat tradisional. Stuers mengutip temuan Veth yang juga disampaikan Valentyn mengenai kepemimpinan perempuan di Aceh (1641-1699) sebelum daerah ini dijajah Belanda. Selain Aceh, beberapa daerah lain yang dipimpin oleh perempuan adalah Minangkabau dan Kalimantan. Tak hanya sebagai pemimpin, sejarah perempuan di Jawa dipenuhi dengan kedudukan terhormat seperti duta pemerintahan dan kiprah politik yang gemilang. Dan di Bali, perempuan memiliki martabat yang sejajar dan tugas yang sama dengan laki-laki.

Menyebarnya Islam di Indonesia pada abad ke-15 membawa perubahan pada hukum adat, termasuk pada posisi perempuan di masyarakat. Percampuran antara hukum adat dengan Islam telah membatasi sekaligus meningkatkan kemerdekaan perempuan. Pada satu sisi, memudarnya kebebasan kehidupan ekonomi perempuan dan kepemilikan hak talak di tangan suami membuat posisi perempuan dalam perkawinan semakin rendah. Pada sisi yang lain, Islam menolak kebiasaan adat kawin paksa dan memberikan pemahaman mengenai individualitas. Artinya, perempuan dapat lebih memikirkan dirinya sendiri alih-alih mempertimbangkan kepentingan keluarga atau klan yang menjadi prioritas utama dalam hukum adat. Nantinya, Islam berkontribusi dalam memberikan semangat persatuan dan kesatuan dan menjembatani partikulturalisme antara daerah dan adat dalam pergerakan nasional melawan kolonial.

Memasuki era kolonial, kedatangan bangsa Belanda yang mengambil alih penuh kekuasaan terhadap sistem pemerintahan dan sumber daya mempengaruhi

kehidupan sosial, khususnya kaum perempuan (Stuers, 2008: 58). Gambaran mengenai perempuan pada masa itu dapat diketahui dari surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada sahabat-sahabat Eropa-nya: Stella Zeehandelaar, Nyonya Abendanon, dan Nyonya N. Van Kol. Dalam surat-surat yang ditulis sejak 25 Mei 1899 hingga 4 Juli 1903, Kartini menceritakan bagaimana adat-istiadat Jawa membelenggu perempuan dan melarang mereka untuk bersekolah. Ketika telah berusia sepuluh hingga dua belas tahun, mereka akan dipingit di dalam rumah. Perempuan-perempuan tersebut dapat kembali ke dunia di luar rumah mereka lagi ketika mereka telah memiliki suami, laki-laki yang dipilihkan oleh orang tua, bahkan tanpa sepengetahuan mereka. Walaupun penggambaran Kartini di dalam suratnya merupakan penggambaran perempuan golongan priyayi, kasus pernikahan dini seperti ini juga terjadi pada kehidupan perempuan-perempuan di kelas yang lebih rendah. Stuers mengutip pembagian perempuan berdasarkan kelas yang dikemukakan oleh N. Dwidjo Sewojo. Golongan pertama disebutnya Golongan Miskin, dimana perempuan mengalami kehidupan yang sangat keras dan tidak memperoleh pendidikan, namun mereka lebih memiliki kebebasan. Golongan kedua adalah Golongan Menengah. Perempuan di kelas ini tidak bersekolah dan dinikahkan pada usia 12 hingga 15 tahun. Setelah menikah, mereka akan membantu suami mereka bekerja di sawah atau berdagang. Golongan ketiga adalah Golongan Santri. Perempuan di kelas ini tidak bersekolah, namun mereka mendapatkan pendidikan agama di rumah. Karena itu, mereka diperlakukan lebih baik oleh suami-suami mereka karena dianggap memiliki kelebihan dibandingkan perempuan pada kelas-kelas sebelumnya. Golongan

keempat merupakan Golongan Priyayi. Beberapa perempuan dari golongan ini menikmati pendidikan dasar, lalu dipingit, dan dinikahkan. Setelah menikah, mereka akan terkekang di dalam rumah tanpa kesibukan (karena memiliki beberapa pembantu). Menghadapi kekangan adat yang terjadi pada waktu itu, tak hanya Kartini yang ingin bertindak. Beberapa perempuan terus berjuang untuk mengubah cara berpikir masyarakat sekaligus kebijakan pemerintah mengenai pendidikan modern. Usaha mereka tidak sia-sia, terbukti dengan didirikannya sembilan sekolah oleh Dewi Sartika di Sunda dan Sekolah Kartini yang diinisiasi van Deventer dan istrinya.

Memasuki era Orde Baru, Indonesia mengalami masa yang disebut Arivia sebagai masa paling menindas bagi kaum perempuan karena campur tangan negara dalam menentukan kriteria “perempuan baik-baik”. Era ini diawali dengan pembubaran dan penghancurkan semua organisasi perempuan yang didirikan pada masa Soekarno karena dianggap terlibat dengan PKI, dan menyebarkan pengaruh jahat terhadap para anggota laki-laki PKI (Wieringa, 2010). Sebagai gantinya, ia mendirikan organisasi Dharma Wanita dan PKK yang menekankan perempuan dalam peran sosialnya sebagai istri, ibu, dan ibu rumah tangga agar perempuan kembali ke jalan yang benar. Suryakusuma meminjam konsep “pengiburumahtangaan” (*housewifization*) dari Maria Mies (1986) dan “Ibuisme” dari Madelon Djajadiningrat (1987) untuk menjelaskan konstruksi Orde Baru mengenai keperempuanan Indonesia. Dijelaskan Suryakusuma (2011: 1-10) dan Walby (1990: 69-70) “pengiburumahtangaan” merupakan proses dimana perempuan didefinisikan sebagai ibu rumah tangga, tanpa mengindahkan

apakah ia benar-benar ibu rumah tangga atau tidak. Implikasi dari definisi tersebut adalah, perempuan hanya dilihat sebagai pasangan dari laki-laki yang mencari nafkah, dan secara ekonomi, perempuan ditempatkan sebagai manusia yang tidak produktif, bergantung pada pendapatan suami, dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga secara “cuma-cuma”. Bagi Mies, pengiburumahtangaan adalah strategi yang digunakan oleh kapitalis untuk mereproduksi tenaga kerja (buruh) laki-laki dan agen-agen konsumen melalui “pendomestikan” atau “penjinakkan” perempuan dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga.

Sedangkan Ibuisme merupakan ideologi yang mendefinisikan perempuan sebagai ibu, dan dukungan terhadap semua konsekuensi dari definisi tersebut yang meliputi: tidak bisanya perempuan berdiri atas identitasnya sendiri karena selalu berada dalam hubungan dengan sesuatu (keluarga, komunitas, negara) atau seseorang (anak, suami, bapak), dan tugas untuk mengurus keluarga, kelompok, maupun negara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Suryakusuma lalu menjelaskan bahwa, jika nilai-nilai ideologi gender yang mengandung unsur “pengiburumahtangaan” dan “ibuisme” ini digabungkan, maka akan mengarah pada domestikasi, situasi dimana perempuan mengalami penjinakkan, segregasi, dan depolitisasi. Kaitannya dengan kapitalisme, perempuan mengalami penjinakan ketika negara menggunakan ideologi gender yang memandang perempuan bukan pencari nafkah utama untuk membenarkan perbedaan upah antara 30 hingga 40 persen lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama, sebagai daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modal. Dibuatnya Kementerian Urusan Peranan Wanita merupakan bentuk segregasi

kebijakan dan praktik yang memisahkan urusan perempuan dengan urusan laki-laki. Sedangkan depolitisasi perempuan terlihat dari konsep “massa mengambang”, dimana perempuan dibebaskan dari urusan politik, dan hanya terlibat satu kali dalam lima tahun dalam Pemilihan Umum.

Manipulasi lain yang dilakukan negara terhadap perempuan pada era Orde Baru adalah pendefinisian utama mereka dalam kategori sebagai istri. Dalam konteks ini, negara mengontrol pegawai negeri sipil laki-laki, yang kemudian mereka mengontrol istri mereka masing-masing, yang akan mengontrol anak-anak mereka dan istri-istri pegawai negeri sipil yang lebih muda melalui organisasi yang didirikan oleh negara yang wajib diikuti. Dalam organisasi ini, posisi perempuan tidak ditentukan oleh kemampuan atau prestasi mereka, tapi mengikuti hierarki jabatan suami. Hal ini disebut Suryakusuma sebagai merefleksikan gagasan mengenai perempuan untuk melayani suami, keluarga, dan negara yang dirangkum dalam *Panca Dharma Wanita*, yaitu: “pendamping laki-laki, pembawa keturunan dan pendidik anak, pengelola rumah tangga, pencari nafkah, dan sebagai anggota masyarakat” (Suryakusuma, 2012: 115).

Pemujaan terhadap peran tradisional perempuan, yaitu “perempuan sebagai pilar bangsa” yang tidak boleh melupakan kodrat sebagai istri dan ibu, sekaligus tuntutan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bagi seluruh warga negara merupakan bentuk manipulasi lain yang memberikan beban ganda terhadap perempuan. Dikatakan beban ganda, karena walaupun gagasan ini terlihat progresif, namun menyiratkan tanggung jawab lain yang harus dipikul perempuan, yang tidak dimiliki laki-laki. Gagasan mengenai hal ini dituangkan

secara resmi dalam dokumen Repelita V (1984-1989), dimana negara mengakui kebutuhan perempuan dalam modernisasi untuk berpartisipasi dalam bidang publik dan memiliki hak, kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun begitu, perempuan tetap harus menjalankan peran sebagaimana disebut Suryakusuma sebagai “inti keluarga dan pembawa norma-norma dan nilai-nilai masyarakat” sekaligus “pencipta keluarga sehat dan bahagia”.

Satu kesamaan antara pemerintahan Soekarno dan Soeharto dalam mengatur perempuan terlihat pada karakter mereka yang Jawa sentris, khususnya dalam menjadikan kebaya sebagai pakaian nasional perempuan – dan jas stelan Barat dipilih sebagai pakaian nasional laki-laki. Menanggapi hal ini, Suryakusuma (2012: 223-228) menyatakan bahwa pemilihan pakaian yang mengadopsi pemimpin kolonial merupakan bentuk dari modernisasi dan keinginan laki-laki untuk dapat sejajar bersanding dengan bangsa penguasa. Sedangkan kebaya untuk perempuan merupakan bentuk pendefinisian ketundukan perempuan terhadap suami dan pemberian bukti mengenai “Indonesia yang murni dan belum tercemar”. Selain itu, kebaya juga dilihat Suryakusuma sebagai wujud pembatasan gerakan dan penonjolan bentuk tubuh perempuan.

Walaupun perempuan memainkan peranan penting dalam menggulingkan rezim Soeharto, masih dikesampingkannya isu-isu perempuan pada masa transisi politik periode berikutnya terjadi karena dua hal, yaitu: (1) sifat masa transisi yang lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat simbolis seperti siapa yang akan menjadi presiden berikutnya dan apakah Soeharto perlu diadili; dan (2) isu perempuan hanya digunakan untuk kepentingan politis yang lain, seperti penolakan partai-

partai politik ber-azas-kan Islam dengan dalih negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak boleh dipimpin oleh presiden perempuan – alasan yang disebut Suryakusuma sebagai perwujudan ambisi Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden (Suryakusuma, 2012: 112-113).

Memasuki era reformasi, lengsernya kekuasaan Soeharto yang memasukkan perempuan ke dalam wilayah domestik dimanfaatkan kaum perempuan untuk turun kembali ke dunia publik. Jika pada tahun 1970-an organisasi politik perempuan (terutama yang berafiliasi dengan Islam seperti Muslimat Nahdatul Ulama) menarik diri karena terintimidasi oleh iklim politik, memasuki masa kritis era Orde Baru, organisasi-organisasi perempuan kembali bermunculan. Selain aktivitas organisasi-organisasi perempuan Islam turun ke desa-desa untuk mendukung kepentingan perempuan, Robinson (2008: 136) juga menyebutkan munculnya kelompok perempuan yang memperjuangkan peningkatan peran dan kekuatan kaumnya, baik dalam arena publik (terutama politik) maupun domestik.

Dalam bidang pendidikan dan ekonomi, penelitian yang dilakukan Smith-Hefner (2007) pada tahun 1999 dan awal tahun 2000-an, mencatat peningkatan partisipasi perempuan di sekolah menengah atas dan kejuruan lebih dari 30%. Semakin tingginya jumlah perempuan bersekolah pada jenjang pendidikan lebih tinggi ini membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan publik, khususnya bidang ekonomi walaupun masih terbatas pada bidang-bidang tertentu seperti sektor kesehatan, pendidikan dan pelayanan. Smith-Hefner juga mencatat perubahan pandangan masyarakat mengenai perempuan bekerja. Pada

awal tahun 2000-an, masyarakat tidak lagi memberikan kecaman sosial terhadap perempuan yang bekerja pada sektor publik sebagaimana hasil penelitian Hull (1982) di Jogja, walaupun pandangan masyarakat mengenai tugas utama perempuan sebagai pengasuh anak dan pengurus rumah tetap terpelihara (p. 394).

Selain perubahan dalam bidang pendidikan dan ekonomi, Islamisasi yang terjadi pada era reformasi memberikan kebebasan pada perempuan untuk menunjukkan identitas ke-Islam-an mereka dengan pemakaian jilbab. Namun bukan itu saja, gerakan Islamisasi yang menginginkan pendirian Negara Islam Indonesia nyatanya membawa ekses pada perempuan. Gagal mengajukan pendirian negara Islam di tingkat nasional, kebijakan otonomi daerah dimanfaatkan untuk membentuk dan memberlakukan hukum syari'ah di daerah seperti yang terjadi di Aceh dan Garut (Robinson, 2008: 171-172). Dalam praktiknya, Perda syari'ah mewajibkan perempuan untuk mengenakan jilbab di tempat-tempat umum dan memberlakukan jam malam untuk perempuan. Jika menemukan pelanggaran, petugas diperkenankan untuk memermalukan mereka di depan umum.

2.2. Gerakan Feminisme di Indonesia

Gerakan feminisme Indonesia telah dimulai sejak sebelum masa kemerdekaan oleh perempuan kelas menengah ke atas. Perempuan di kelas ini memegang peranan penting karena selain dapat menikmati pendidikan, mereka juga memiliki waktu luang, dan akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Arivia (2006: 15-17) memetakan gerakan ini kedalam empat tahap, yaitu: zaman pendudukan Belanda, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi. Stuers (2008: 58-59)

mengatakan, perubahan besar terhadap gerakan perempuan dan gerakan nasional di Indonesia terjadi pada sekitar tahun 1904-1914 karena diberlakukannya kebijakan “politik etis” oleh pemerintah Belanda. Momen ini dimanfaatkan dengan baik oleh perempuan. Jika sebelumnya aspirasi perempuan masih bersifat sosial dan nonpolitis, memasuki era ini perjuangan meraih emansipasi dilakukan melalui organisasi. Organisasi pertama yang didirikan adalah Poetri Mardika (1912), organisasi yang berafiliasi dengan Boedi Oetomo. Isu utama yang dibawa pada masa itu adalah pendidikan, menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri, serta memberikan kesempatan pada perempuan untuk terlibat dalam ruang publik. Pada tahun 1913, organisasi ini menerbitkan surat kabar yang memihak kepentingan perempuan. Beberapa artikel yang dimuat dalam surat kabar tersebut diantaranya berjudul: Poligami dan pernikahan dini: *Kebiasaan masa lalu yang harus diakhiri*, *Kaum muda yang berbuat kejahatan dan diabaikan*, *Pernikahan dini*, *Pernikahan dini dan kawin paksa harus dihapuskan*, dan *Kebiasaan Masa Lalu dan Masa Kini: Kongres Gerakan Feminis di Paris*. Selain Poetri Mardika, beberapa organisasi yang didirikan pada masa itu adalah Keutamaan Istri (1912), Pawijatan Wanito (1913), Wanito Hadi (1915), Wanito Susilo (1918), dan Aisjijah yang berlandaskan Islam. Selain dalam bentuk organisasi, pada tahun 1913 Siti Soedari merintis penerbitan independen bernama *Wanito Sworo*. Dalam artikel-artikel yang ditulisnya, Siti Soendari mengkritik poligami dan pentingnya pendidikan untuk kaum perempuan demi kemajuan nasional. Selain sebagai jalan untuk melakukan emansipasi, organisasi-organisasi ini telah mampu melepaskan perempuan-perempuan kelas menengah dan priyayi untuk keluar dari tradisi

pingitan dan berinteraksi dengan perempuan-perempuan dari golongan lain. Darwin (2004: p. 285-286) mengatakan bahwa tonggak terpenting dari perjuangan tahap ini terjadi pada 22-25 Desember 1928 dimana semua organisasi pergerakan perempuan yang muncul pada masa itu berkumpul untuk pertama kalinya dalam “Kongres Perempuan Indonesia” di Yogyakarta yang diinisiasi oleh Nyonya Soekonto, anggota komite Boedi Oetomo. Agenda yang dibicarakan dalam kongres ini adalah persoalan pendidikan dan perkawinan. Kongres perempuan Indonesia kedua dilaksanakan pada 20-24 Juli 1935 di Jakarta. Dalam kongres ini disepakati tentang komitmen terhadap pemberantasan buta huruf, melakukan penyelidikan tentang posisi perempuan dalam Islam serta berupaya untuk meningkatkan posisi tersebut, serta peningkatan kesadaran perempuan sebagai “ibu dari rakyat” yang mengajarkan anak-anak mereka tentang tugas dan tanggung jawab terhadap tanah air.

Persoalan politik mengenai hak pilih merupakan agenda kongres perempuan Indonesia ketiga yang dilaksanakan di Bandung pada Juli 1938. Agenda ini muncul sebagai reaksi terhadap pemerintah kolonial yang menolak memberikan hak pilih terhadap perempuan. Penolakan pemerintah terhadap pemberian hak pilih dinilai sebagai hal diskriminatif karena sejarah mencatat bagaimana perempuan tradisional di Minangkabau, Minahasa dan Jawa telah membuktikan kemampuan politik mereka yang setara dengan laki-laki dalam masyarakat adat. Selain membahas tentang hak pilih, kongres perempuan ketiga ini juga menghasilkan pendirian Komisi Perkawinan yang bertanggungjawab terhadap peraturan perkawinan, tanpa menyerang Islam.

Walaupun belum dapat mewujudkan relasi yang setara dengan laki-laki, kegigihan perjuangan perempuan pada masa itu mencatat keberhasilan dengan terbukanya akses dalam bidang sosial dan pendidikan. Namun, kesuksesan ini sekaligus menunjukkan bagaimana perempuan di kelas priyayi/bangsawan benar-benar berbeda dengan mereka yang berada di kelas rendah. Para perempuan di kelas rendah ini masih harus bekerja keras di sawah, perkebunan, dan pabrik (Stuers, 2008: 133-148). Artinya, gerakan feminisme yang terjadi di Indonesia tidak mewakili gerakan dan kepentingan perempuan Indonesia secara keseluruhan karena hanya bersifat *Javanese middle-class oriented* (Blackburn, 2008: 12).

Tahap berikutnya merupakan tahap kepemimpinan Presiden Soekarno (Orde Lama). Isu-isu yang difokuskan oleh pergerakan perempuan Indonesia pada tahap ini adalah isu kesetaraan dalam undang-undang perkawinan, pendidikan, dan kondisi pekerja perempuan. Kowani (Kongres Wanita Indonesia) merupakan organisasi yang pada waktu itu memayungi dan memfasilitasi semua keperluan perjuangan perempuan. Namun demikian, Kowani tidak memiliki hak untuk membuat keputusan dengan mengatasnamakan kelompok perempuan.

Meningkatnya pengaruh PKI dan PNI yang berhaluan kiri pada pemerintahan Soekarno pada akhir dasawarsa 1950-an membawa peningkatan pada posisi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI. Empat anggota Gerwani berhasil terpilih dalam Pemilihan Umum 1955. Dengan jumlah anggota lebih dari satu juta orang, gerakan Gerwani berada pada persoalan seputar perkosaan, peningkatan kesadaran perempuan tani,

membantu pergerakan buruh, dan melibatkan diri dalam berbagai demonstrasi atau protes kenaikan harga pada tahun 1965.

Naiknya Soeharto sebagai presiden pada tahun 1965 membuat semua organisasi yang berhubungan dengan ideologi kiri dibubarkan dan dihancurkan. Pemerintahan Soeharto membuat propaganda yang menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh PKI (pihak yang dituduh Soeharto sebagai pelaku pembunuhan dan penculikan sejumlah perwira menengah Angkatan Darat dan enam jenderal) merupakan pengaruh jahat dari kaum perempuannya. Karena itu, para anggota Gerwani diperkosa, disiksa, dan dibunuh. Soeharto lalu membentuk organisasi baru untuk mengembalikan perempuan Indonesia ke “jalan yang benar”, yaitu Dharma Wanita, dengan mengokohkan peran perempuan sebagai istri, ibu, dan ibu rumah tangga dengan kuat. Disebutkan Arivia (2006: 17), Suryakusuma (2011: 10), dan Marching (2011: 85-86), perempuan Indonesia tidak pernah begitu tertindas sebagaimana yang dialami oleh perempuan pada masa Orde Baru. Sebagaimana diktum yang mengatakan bahwa semakin tinggi penindasan akan memunculkan resistensi yang semakin tinggi, pada masa itu hal ini pun terjadi. Dalam pemerintahan Soeharto, LSM perempuan tumbuh dengan subur. Beberapa diantaranya adalah Yayasan Annisa Swasta (1982) yang memfokuskan pada perjuangan membela buruh perempuan, Kalyanamitra (1985) bergerak dalam bidang dokumentasi, dan Yayasan Solidaritas Perempuan (1986) bergerak dalam bidang buruh migran (Darwin, 2004: p. 291). Memasuki 32 tahun berkuasanya Soeharto yang represif, perempuan memainkan peranan penting dalam menurunkannya dari kursi presiden. Perempuan secara kreatif turun ke

jalan. Bukan dengan spanduk bertuliskan “turunkan Soeharto”, namun “turunkan harga susu”, permainan kata yang didasarkan pada aturan politik represif dalam budaya patriarkal yang digunakan Soeharto untuk mengontrol perempuan.

Tahap keempat pergerakan feminisme di Indonesia disebutkan Arivia (2006: 15) sebagai gerakan liberal bertemakan anti kekerasan terhadap perempuan. Tema pergerakan ini disebutkan Darwin (2004: p. 291) termanifestasi dalam munculnya banyak lembaga bantuan hukum dan pendampingan terhadap korban kekerasan seperti WCC, RA, LBH, APIK, Mitra Perempuan, Safi Amira, dan Mitra Anisa. Selain pergerakan bertemakan anti kekerasan, Darwin juga menyebutkan tentang perjuangan untuk meraih kesetaraan antara relasi gender dalam segala bidang merupakan isu yang masih diperjuangkan. Walaupun isu ini telah dituangkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, namun produk hukum berupa Inpres ini masih mengindikasikan lemahnya posisi perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan di masyarakat.

Pengarusutamaan Gender (PUG) sendiri merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan. Tujuan dari PUG adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya strategi yang dirumuskan dalam bentuk rancangan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program dan kebijakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya ini, kesempatan, akses, kendali, dan manfaat pembangunan diharapkan lebih berpihak pada perempuan.

Pada tataran implementasi, PUG hanya menjadi istilah yang muncul pada acara diskusi dan media populer, seperti televisi dan radio. Dalam tataran masyarakat, kesetaraan gender yang diusung oleh strategi PUG dengan istilah “kemitrasejajaran pria dan wanita” dimaknai sebagian besar laki-laki (terutama kelas menengah) sebagai “partisipasi laki-laki dalam melakukan pekerjaan rumah tangga”. Hal yang menimbulkan antipati di kalangan laki-laki. Disebutkan Robinson (2008: 140-141), sikap ini merupakan suatu bentuk pengakuan tentang bagaimana kesetaraan gender akan menjadi perubahan sosial yang radikal dalam masyarakat Indonesia.

Isu lain yang menjadi fokus perjuangan perempuan di era reformasi adalah peningkatan partisipasi politik. Berbagai gerakan yang dilakukan perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak dalam arena politik ternyata belum membawa keberhasilan. Para aktivis perempuan yang mengusung slogan “Demokrasi tanpa partisipasi perempuan bukanlah demokrasi sesungguhnya” harus menelan kekecewaan ketika pada Pemilu 1999 dengan total pemilih perempuan sebesar 57%, jumlah perempuan yang berhasil duduk di legislatif turun dari 12% di era Soeharto menjadi 9%. Disebutkan Blackburn (*dalam* Robinson, 2008: 159), fakta ini merupakan sebuah refleksi mengenai keanggotan perempuan di parlemen pada era Soeharto bukan didasarkan atas kemauan sang perempuan, namun penunjukan atas dasar hubungan kekeluargaan dengan presiden, petinggi Golkar maupun militer. Sementara itu, pada era reformasi, syarat pencalonan anggota parlemen yang harus diusung oleh partai politik merupakan masalah tersendiri. Partai politik segan untuk memasukkan perempuan dalam bursa

pencalonan. Seandanyaipun dicalonkan, posisi perempuan akan ditempatkan pada urutan terbawah yang lazim disebut sebagai “urutan sepatu”. Naiknya Megawati Soekarno Putri sebagai presiden RI periode 2000-2004 juga tak lantas meningkatkan partisipasi politik perempuan secara signifikan. Walaupun menunjuk dua perempuan dalam jabatan menteri, yaitu Sri Rejeki Sumaryoto sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Rini Suwandi sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Megawati tidak mendukung kebijakan afirmatif yang mensyaratkan kuota 30% untuk perempuan. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik mengurangi martabat keperempuanan mereka (Soetjipto *dalam* Robinson, 2008: 160). Peningkatan keanggotaan perempuan di parlemen nampaknya akan tetap menjadi salah satu fokus perjuangan pergerakan perempuan karena hingga Pemilu 2014, kuota 30% perempuan belum terpenuhi. Robinson mengutip catatan Ani Soetjipto (1997) yang menulis “Perempuan memiliki perbedaan kepentingan dan kebutuhan dengan laki-laki. Isu-isu mengenai perempuan harus dituangkan dalam badan pembuat kebijakan agar dapat diartikulasikan dan diperjuangkan dengan lebih baik”.

2.3. Sinetron Televisi sebagai Instrumen Ideologi Patriarki dan Kapitalis

Menurut van Zoest (1991), teks dalam media kontemporer tak pernah lepas dari, dan memanipulasi khalayak ke arah ideologi tertentu (*dalam* Sobur, 2012: 60). Tidak disadarinya kehadiran ideologi ini disebutkan Croteau dkk (2012: 154) karena ideologi tersebut merefleksikan hal-hal yang dipandang “alamiah” sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Croteau dkk menjelaskan ideologi sebagai kerangka berpikir dasar manusia dalam mengartikan,

menjelaskan, dan memaknai dunia. Ideologi tidak selalu mencerminkan realitas, namun dapat didistorsi karena realitas sendiri merupakan hasil konstruksi. Kaitannya dengan relasi gender, ideologi dominan yang tercermin dalam teks media maupun dalam kehidupan masyarakat adalah ideologi patriarki yang dijelaskan Kamla Bhasin (*dalam* Sunarto, 2009: 38 & Ibrahim, 2007: 22) sebagai pandangan yang menempatkan kaum pria lebih berkuasa dibanding kaum perempuan. Richmond-Abbot (1992: 19) menyebutnya sebagai superioritas status laki-laki berikut kemampuan mereka dalam mengendalikan berbagai instansi dalam masyarakat. Sedangkan Walby (1990: 28) menyebut patriarki sebagai sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik dimana perempuan didominasi, ditindas, dan dieksploitasi oleh laki-laki. Walby menyebutkan pentingnya penggunaan istilah struktur sosial karena patriarki menunjukkan penolakan terhadap determinisme biologis dan di dalamnya terkandung gagasan mengenai posisi setiap perempuan yang subordinat terhadap laki-laki. Alih-alih memastikan jika laki-laki dan perempuan “harus” berbeda, ideologi ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan “memang” berbeda (Sugihastuti, 2007: 50). Perbedaan ini lantas dituangkan dalam oposisi biner di segala bidang kehidupan yang menyebabkan opresi terhadap perempuan.

Penyebab lain opresi terhadap perempuan dalam perspektif feminis sosialis adalah kapitalisme. Bottomore menjelaskan kapitalisme sebagai istilah yang merujuk pada cara dimana modal dan segala bentuknya (uang, mesin, material produksi) merupakan alat utama dalam proses produksi (*dalam* Sunarto, 2009: 44). Dijelaskan Sunarto, kehadiran kapitalisme yang menjadikan pencarian

laba sebagai fokus kegiatan telah menciptakan segregasi wilayah dan peran sosial dengan menempatkan perempuan sebagai konsumen dan pemulih tenaga kerja produktif dalam produksi barang yang tidak dibayar.

2.4. Sinetron sebagai Genre Perempuan

Sinetron (sinema elektronik) merupakan istilah yang merujuk pada tayangan berseri yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Sinetron pertama yang ditayangkan di stasiun tv di Indonesia berjudul *Keluarga Rahmat* yang mulai ditayangkan pada tahun 1989 di RCTI. Sinetron ini diproduksi untuk menggambarkan warna khas Indonesia kedalam empat wacana, yaitu: kekeluargaan, kerukunan, hidup sederhana, dan wawasan nusantara (Kitley, 2000: 147). Dilihat dari karakteristik dan historisitasnya, sinetron yang menekankan pada hubungan antar manusia, domestisitas dan kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan *soap opera* (Ang dalam Kitley, 2000: 150). Awalnya, *soap opera* yang dirintis oleh Frank dan Anne Hammert di Amerika Serikat pada tahun 1930-an ini dibuat sebagai strategi untuk memikat perempuan dalam kapasitas mereka sebagai konsumen (Hall, 2013: 362). Opera sabun yang pertama dibuat tidak menggunakan medium televisi, tetapi radio. Hall mengutip pemikiran Robert Allen yang mengatakan bahwa sebagai strategi bisnis, opera sabun dinilai lebih efektif dibandingkan media yang telah ada pada waktu itu (spot iklan di radio dan majalah).

Karakteristik opera sabun (sinetron) dirangkum Brown (dalam Burton, 2005: 253-255 dan Fiske, 2003: 469-470) sebagai berikut: tokoh-tokohnya didominasi oleh perempuan; menampilkan tokoh laki-laki yang memiliki “kekurangan”, seperti kurang pintar dalam bermasyarakat; menampilkan banyak

tokoh dan karakter, namun terpusat pada beberapa keluarga saja; latar tempat yang digunakan merupakan lokasi yang memungkinkan terjadinya banyak dialog antartokoh (lebih menekankan dialog alih-alih aksi/tindakan); menceritakan tentang kondisi kekinian masyarakat; memiliki beberapa jalan cerita yang dipenggal-penggal, lalu diedit dan digabungkan dengan jalan cerita tokoh-tokoh lain; setiap akhir episode dibuat mengambang dan menegangkan agar penonton tertarik untuk menyaksikan episode-episode berikutnya; menekankan pada hubungan antar tokoh, termasuk masalah dan dialog yang terjadi diantara tokoh-tokoh tersebut; memiliki keterbatasan referensi dalam menampilkan realitas sehingga memungkinkan untuk menampilkan tokoh berlandaskan ideologi tertentu; cerita terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Hall (2013: 362); Burton (2005: 252); Marshment (1993: 139); dan Kuhn (2012: 593) meyakini bahwa opera sabun (sinetron) merupakan tayangan bergender yang ditujukan untuk perempuan. Namun demikian, bukan berarti perempuan dapat mengekspresikan dirinya secara bebas (Hall, 2013: 362). Faktanya, opera sabun merupakan media yang digunakan untuk menampilkan perempuan sebagaimana konstruksi yang diinginkan oleh budaya patriarki.

2.4.1. Tren Sinetron Religi di Indonesia

Walaupun telah memiliki stasiun televisi nasional sejak tahun 1965 dan stasiun televisi swasta sejak 1989, sinetron religi yang telah populer di Mesir baru muncul di Indonesia pada tahun 1998. Dari hasil penelitian yang dilakukan Rakhmani (2013: p. 61-88), ia menemukan bahwa konten-konten Islami sebenarnya telah ada dalam televisi Indonesia dalam format lain, yaitu: drama religi yang bersifat

fiktif dan naratif, pengajian Al-Qur'an, mimbar agama Islam (tanya-jawab seputar kehidupan sosial masyarakat yang menghadirkan tokoh agama Islam sebagai nara sumber/konsultan), dan qasidah (ketiga acara ini ditayangkan di TVRI); serta dakwah agama Islam dan adzan maghrib yang ditayangkan di stasiun televisi swasta. Mengutip istilah Van Bruinessen (2013) yang menyebut 1998 sebagai masa peralihan ke arah Islam konservatif kaitannya dengan komersialisasi dalam industri pertelevisian nasional, Rakhmani menjelaskan bahwa sedikitnya konten bernuansa religi pada era sebelum 1998 merupakan wujud dari kebijakan pemerintah untuk tidak membiarkan televisi dijadikan sebagai arena kontestasi terbuka dari berbagai ideologi seperti nasionalisme, keagamaan dan komunisme. Karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan kontrol yang ketat terhadap televisi yang memang dirancang untuk menjadi alat pemersatu bangsa dengan terus mensosialisasikan nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila.

Memasuki awal tahun 1990-an, Islamisasi, lengsernya kekuasaan Soeharto secara berangsur-angsur, dan liberalisasi ekonomi yang menyerang Asia Tenggara pada tahun 1980an membuat pemilik stasiun televisi mencari strategi bisnis yang menguntungkan agar mampu bertahan hidup dan memperoleh keuntungan (Rakhmani, 2014: p. 435-466). Melihat potensi khalayak yang didominasi oleh umat Islam, pada tahun 1998 Raam Punjabi melalui rumah produksinya, MultiVision Plus (MVP), membawa konten religi ke dalam format sinetron. Konten religi yang dihadirkan dalam format sinetron dinilai sebagai strategi bisnis yang baik karena selain dapat menarik khalayak dari kelompok mayoritas, format ini tetap dapat diterima oleh kelompok lain dalam masyarakat. Keberhasilan

sinetron ini lantas ditiru oleh stasiun televisi lain hingga memunculkan genre baru, yaitu sinetron religi, sejalan dengan meluasnya Islamisasi dalam sektor ekonomi. Bagi industri televisi sendiri, kehadiran sinetron religi telah memperpanjang jam *prime time* tayangan televisi, dari jam 19.00 WIB – 21.00 WIB menjadi 18.00 WIB – 22.00 WIB (Rakhmani, 2014: 443).

Dijelaskan Rakhmani (2014: 445-446), sejak pertengahan tahun 2000, sinetron religi mengambil latar kehidupan kelas menengah perkotaan yang menjalankan tradisi Islam. Dengan jumlah sinetron religi sebanyak 12,4% (335) dari total 2.700 judul sinetron yang ditayangkan antara tahun 2005 hingga 2010, Rakhmani mengelompokkan sinetron religi ke dalam tiga kategori berdasarkan format, alur, narasi, dan penggambaran visual, yaitu: Sinetron Religi Mistis, Melodrama Islami, dan Sinetron Komedi Religi. Antara tahun 1998-2003, tren sinetron religi di tv diwarnai oleh sinetron yang mengkombinasikan unsur religi Islam dengan kekuatan ghaib (mistis). Beberapa judul diantaranya adalah: *Rahasia Ilahi, Hidayah, Mereka Ada Dimana-mana, Allah Maha Besar, dan Dosa Tak Berampun*. Walaupun tumbuh subur pada tahun 2005-2008, tren sinetron ini meredup pada tahun 2008 karena menuai banyak kritik dari masyarakat karena sifatnya yang tidak rasional.

Berikutnya, kesuksesan film bioskop *Ayat-ayat Cinta* pada tahun 2009 telah menginspirasi para pengelola tv untuk membuat sinetron dengan format serupa, yaitu Melodrama Islami. Ciri sinetron dalam kategori ini adalah: menggunakan judul yang mencirikan islam, plot/alur cerita berpusat pada hubungan pribadi (baik dalam hubungan percintaan maupun konflik dalam

keluarga atau rumah tangga), menggunakan simbol-simbol Islam seperti jilbab, baju koko, menggunakan latar masjid, dan menggunakan hiasan dinding berbentuk masjid atau kaligrafi, serta banyak menggunakan nama dan ucapan-ucapan dalam Islam seperti *Assalamu'alaikum*, *Alhamdulillah*, dan *Allahu Akbar*. Beberapa judul dalam kategori ini adalah *Ta'aruf*, *Buku Harian Menuju Surga*, dan *Mukjizat Cinta* di TPI; *Amanah Cinta*, *Annisa*, *Zahra*, *Rumahku Surgaku*, dan *Hafizah* di SCTV; *Alisa*, *Aqso dan Madina*, *Assalamualaikum Cinta*, *Munajah Cinta*, *Muslimah*, dan *Ketika Cinta Bertasbih* di RCTI.

Bulan Ramadhan 2007 menjadi awal munculnya kategori baru sinetron religi. Sinetron *Para Pencari Tuhan* yang ditayangkan di stasiun tv SCTV mendapatkan penerimaan yang baik oleh masyarakat. Kesuksesan sinetron ini menginspirasi stasiun tv lain dengan memproduksi sinetron dengan genre serupa. Beberapa judul yang kemudian muncul adalah *Kiamat Sudah Dekat*, *Lorong Waktu*, *Islam KTP*, *Pesantren Rock 'n Roll*, *Tukang Bubur Naik Haji*, *Anak-anak Manusia*, dan *Emak Ijah Pengen ke Mekkah*. Berbeda dengan Sinetron Mistis dan Melodrama Islami, dalam kategori ini perbedaan hitam-putih yang mencolok antara karakter protagonis dan antagonis tidak terlalu ditekankan. Bahkan, genre ini dapat menampilkan seorang ustadz yang mendalami agama pun dapat digambarkan sebagai orang yang sering berbuat kesalahan, sebagaimana tokoh Haji Muhidin dalam sinetron *Tukang Bubur Naik Haji*, *the Series*.

Kaitannya dengan penggambaran perempuan, perbedaan kategori dalam sinetron religi nyatanya tidak membawa perbedaan signifikan dalam bagaimana perempuan di tampilkan di layar kaca. Sinetron-sinetron ini tunduk pada stereotip

tradisional perempuan yang dibentuk oleh masyarakat patriarki. Sinetron religi mistis memiliki kecenderungan untuk menampilkan perempuan sebagai hantu perempuan yang jahat dan gentayangan dengan sosok yang cantik, seksi dan suka menggoda laki-laki. Perempuan ini biasanya merupakan korban perkosaan atau pembunuhan yang mati penasaran. Ia lalu membalas dendam kepada laki-laki yang menyiksanya sewaktu masih hidup dengan membunuh mereka satu persatu. Ketika sampai pada korban terakhir, hantu ini akan bertemu dengan seorang ulama yang pasti laki-laki. Ulama ini akan menyadarkannya, lalu ia akan kembali ke alam kubur dengan tenang (Nazaruddin, 2007). Lebih lanjut dijelaskan Nazaruddin, andaikata tidak ditampilkan sebagai sosok hantu, mereka digambarkan sebagai dukun perempuan yang menjadi sumber malapetaka dalam masyarakat, menjadi dalang suatu kejahatan karena iri pada perempuan lain, atau menjadi penyebab timbulnya konflik.

Tidak terlalu berbeda dengan sinetron religi mistis, dalam melodrama religi, penggambaran perempuan tidak menguntungkan perempuan. Pengkarakteran perempuan dalam sinetron ini tunduk pada premis moral bahwa istri yang mulia adalah istri yang penurut, pemaaf, penuh pengabdian, lemah lembut yang hanya berdiam diri, menangi nasib dan mengadukan penderitaannya pada Tuhan tanpa melakukan usaha nyata untuk menolong dirinya sendiri. Perempuan yang ditampilkan melakukan usaha untuk mengubah nasibnya adalah perempuan jahat yang selalu mencari cara untuk menjatuhkan tokoh baik. Realistis maupun tidak, bagaimanapun caranya, hukum alam akan berlaku. Tokoh baik akan selalu menang dengan bantuan orang lain yang biasanya laki-laki,

sehingga penonton dibuat bersimpati terhadap tokoh laki-laki ini (Astuti, 2010). Sedangkan dalam sinetron religi komedi, perempuan ditampilkan sebagai makhluk domestik dengan berbagai pekerjaan rumah seperti membuat dan mengantarkan minuman, memasak, dan berbelanja kebutuhan dapur. Perempuan juga digambarkan dengan karakter pencemburu, suka bergunjing, gemar dirayu, emosional, materialistis, dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan (Thaniago & Arief, 2014). Mengingat sifatnya yang mudah diakses dan digemari, penggambaran stereotipikal mengenai perempuan di televisi dengan motif komersial ini akan menjadi manifestasi cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Hal ini akan melanggengkan ketimpangan dalam relasi gender yang telah dibentuk oleh struktur sosial, politik, agama, dan budaya.

2.4.2. Profil Sinetron *Tukang Bubur Naik Haji the Series*



Gambar 2.1 Sinetron *Tukang Bubur Naik Haji, the Series*

Tukang Bubur Naik Haji, The Series merupakan sinetron produksi *SinemArt* yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI sejak 28 Mei 2012. Dari awal penayangan, sinetron ini berada di jam *prime time* dan menempati posisi 10 besar *rating* dan *share* AC Nielsen. Mengambil latar tempat sebuah kampung di sekitar Jakarta

bernama Kampung Duku, ide cerita sinetron ini berkisar pada hubungan antarwarga yang berpusat pada kebencian H. Muhidin terhadap H. Sulam dan seluruh anggota keluarganya. Diceritakan, Muhidin merupakan anak tertua H. Somad, pendiri kampung Duku. Sebagai keturunan H. Somad dan telah dua kali pergi haji, Muhidin merasa dirinya merupakan sesepuh kampung yang sangat dihormati. Apalagi ia juga menjabat sebagai Ketua RW. Keseluruhan cerita sinetron ini dihiasi dengan tingkah Muhidin yang merasa dijadikan tauladan warga kampung atas keberhasilannya menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik, namun sebenarnya ia tidak sukai warga karena kebiasaannya menuduh tanpa bukti, memfitnah, menyinggung perasaan orang lain, merasa paling benar, sombong dan ingin menang sendiri. Muhidin memiliki seorang adik bernama Mahmud. Berbeda dengan Muhidin, Mahmud merupakan orang yang baik, bijak, dan rasional. Karenanya, Mahmud sering bertengkar dengan kakak kandungnya. Setelah Muhidin dipecat secara tidak hormat, Mahmud menjadi Ketua RW baru yang dipilih oleh warga.

Konflik antara Muhidin yang ingin menjatuhkan keluarga Sulam semakin menjadi ketika Robby, adik ipar Sulam, menikah dengan Rumana (anak tunggal Muhidin dan Maemunah). Muhidin selalu berusaha membuat Robby kesal, bahkan menceraikan Rumana dari Robby. Namun karena mengetahui sifat dan kebencian abahnya terhadap keluarga Sulam, Rumana selalu membela suaminya.

Setelah Maemunah meninggal, Muhidin menikah dengan Rumi, seorang pengusaha restoran dan salon spa sukses yang baru pulang ke Indonesia setelah kematian suaminya di Perancis. Rumi merupakan adik H. Razak, teman lama

Muhidin. Razak dan istrinya, Hj. Aisyah, kasian melihat Rumi terlalu sibuk mengurus bisnisnya hingga tidak berpikir untuk menikah lagi setelah bercerai dari suami keduanya. Karena itu, mereka menjodohkan Rumi dengan Muhidin yang usianya jauh lebih tua dibanding Rumi. Awalnya Rumi menolak perjodohan tersebut, apalagi mengingat usia dan perbandingan latar belakang dirinya dengan Muhidin yang sangat berbeda. Rumi yang berasal dari keluarga berada, pengusaha sukses, berpendidikan tinggi, dan lama tinggal di Paris melihat Muhidin sebagai sosok yang norak dan kampungan. Namun Razak dan Aisyah terus meyakinkan Rumi bahwa Muhidin merupakan orang yang *shaleh*, setia, baik, dan dapat menjadi imam. Rumi akhirnya luluh. Setelah akhirnya menikah dengan Muhidin, Rumi berubah menjadi istri yang berbakti, sabar dan perhatian terhadap suami.

Sinetron *Tukang Bubur Naik Haji, The Series* ini dapat dikatakan unik karena walaupun tokoh inti dari cerita ini, Haji Sulam yang diperankan oleh Mat Solar sudah tidak tampil sejak episode 300an, sinetron ini tetap mendapatkan *rating* dan *share* yang tinggi, bahkan mampu memecahkan rekor sebagai sinetron dengan episode terbanyak di Indonesia. Berikut merupakan tabel sinetron dengan jumlah terbanyak di Indonesia:

Tabel 2.1
Sinetron dengan episode terbanyak di Indonesia

Judul Sinetron	Jumlah Episode	Keseluruhan Jumlah Musim
Tukang Bubur Naik Haji, <i>The Series</i>	1718 episode	1 musim
Cinta Fitri	1002 episode	7 musim
Raden Kian Santang	835 episode	1 musim
Bajaj Bajuri	679 episode	1 musim
Putri yang Ditukar	676 episode	1 musim
Suami Suami Takut Istri	630 episode	1 musim

Sumber: Wikipedia

Kesuksesan sinetron *Tukang Bubur Naik Haji, The Series* tak hanya dapat dilihat dari *rating, share* dan jumlah episode. Sinetron yang menerima penghargaan panasonic Gobel Awards sebagai Drama Seri Terfavorit dua tahun berturut-turut pada 2013 dan 2014 serta penghargaan *Best Foreign Drama* dalam Tokyo Drama Festival ini memiliki penonton setia yang tergabung dalam *fan base* *Tukang Bubur Naik Haji, The Series*. Pada 21 Agustus 2015 pukul 17.15 WIB akun *twitter @TBNH_TheSeries* memiliki *follower* berjumlah 81,2 K, sedangkan pada *page* Facebook *TUKANG BUBUR NAIK HAJI The Series*, sebanyak 1.397.151.

Keberhasilan sinetron *Tukang Bubur Naik Haji, The Series* untuk bertahan dalam memperebutkan khalayak dengan tayangan lain di jam *prime time* membuat Kartikasari (2013) meneliti motif menonton sinetron ini dengan menggunakan metode analisis resepsi/khalayak. Hasilnya, Kartikasari menemukan ketiga motif tersebut adalah: motif kognitif, motif identitas personal, dan motif diversifikasi. Motif kognitif berhubungan dengan keinginan khalayak untuk mendapatkan informasi/pengetahuan mengenai Islam yang sering diujarkan para tokoh. Motif identitas personal berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa dijadikan sebagai panutan, seperti kesabaran, tutur bahasa atau gaya berbusana salah satu tokoh. Sedangkan motif diversifikasi berhubungan dengan aspek hiburan yang diperoleh dengan menonton sinetron tersebut.